

## DESAIN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bambang Suhada<sup>1</sup>, Ratmono<sup>2</sup>

Email: [basucpc@gmail.com](mailto:basucpc@gmail.com)

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro

### I. Pendahuluan

Dalam melaksanakan mandat otonomi, Pemerintahan Daerah harus mampu membuat terobosan, kreatif dan menggali potensi daerahnya, serta senantiasa mengikuti arus perkembangan teknologi. Mengapa demikian ?, hal tersebut disebabkan dalam prinsip-prinsip desentralisasi telah menggambarkan diskresi yang lebih besar untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ketika Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan inovasi, maka segenap potensi lokal akan terbangkitkan dan dikemas dalam konstruksi otoritas daerah. Dengan demikian, daerah leluasa melakukan improvisasi sesuai dengan kewenangannya serta terbangunnya ragam inovasi dalam mendorong akselerasi pembangunan daerahnya.

Inovasi merupakan cara baru dalam praktik tata kelola pemerintahan. Konsep ini lahir seiring dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki dalam mengatasi problemagunan. Cara-cara baru ini membuat proses menjadi efektif, memangkas prosedur yang tidak diperlukan dan hanya memakan anggaran, membuat kapasitas pelaksana semakin berkembang, dan yang paling penting tujuan yang didambakan tercapai dengan gemilang. Oleh karenanya, inovasi merupakan sesuatu yang berperan penting dalam otonomi, sebab secara langsung maupun tidak langsung dia mampu menjadi jalan pintas kemajuan. Apabila otonomi merupakan kondisi yang tidak boleh tidak dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, maka inovasi juga sesuatu yang harus dilakukan daerah. Sayangnya, dalam perjalanan otonomi bangsa ini, praktik cerdas dalam pembangunan masih amat jarang terdengar kabar beritanya. Padahal otonomi yang merupakan wadah terciptanya beragam inovasi,

setidaknya memaksa Pemerintah Daerah dan masyarakatnya untuk berkreasi lebih nyata (Kadir *et al*, 2012).

Untuk mendorong inovasi daerah, Pemerintah Daerah selain perlu menyiapkan kelembagaan, sistem, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai aktor utama Pembangunan juga harus dapat menciptakan dan mengembangkan konsep yang dapat menarik para pelaku usaha untuk berinvestasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus kreatif sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam melahirkan ide-ide baru yang dapat mendorong aktivitas ekonominya. Diyakini jika pengembangan inovasi daerah akan melahirkan aparatur Pemerintah Daerah serta masyarakat yang inovatif, dan berani membuat terobosan namun tetap dalam koridor hukum.

Menurut Tuerah (2010), sebagai bagian dari inovasi, kreativitas yang diciptakan dan dikembangkan oleh daerah pada hakekatnya akan bermuara pada peningkatan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung, perumusan Peraturan Daerah mendorong pengembangan ekonomi daerah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, industri pariwisata berbasis sumberdaya, budaya, dan komunitas lokal, dan promosi daerah bersama untuk menarik lebih banyak wisatawan dan investor masuk ke daerah. Semua kegiatan ini adalah bagian dari inovasi daerah untuk mendorong dan mempercepat pembangunan daerah yang saat ini sangat ketat bersaing dengan daerah lain di dalam negeri dan luar negeri.



Gambar 1. Urgensi Inovasi Dalam Kerangka Desentralisasi (Bappenas, 2018)

Kompleksitas peran pemerintah daerah dalam memajukan inovasi sangat konstruktif, mulai dari penggalan gagasan sampai pada unsur pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Untuk itu, menjadi hal penting, ketika mendengarkan isu inovasi dalam pembangunan daerah merupakan satu langkah kongkret untuk menciptakan kemandirian, dan pemanfaatan kekayaan lokal sebagai salah satu ukuran keberhasilan inovasi pada era otonomi daerah ini (Kartika, 2017). Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memiliki visi dan misi yang terangkum dalam sembilan program prioritas bertajuk Nawacita. Dalam Nawacita Program ke-3 disebutkan bahwa pemerintah Jokowi-JK ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan program tersebut diperlukan perencanaan dan inovasi dari setiap kepala daerah dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan daerah. (Majalah Simpul, 2017).

## II. Perspektif Inovasi Daerah

### 2.1. Pengertian, Karakteristik dan Sifat Perubahan

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar.

Inovasi menurut Robbins (1994), inovasi sebagai *suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa*. Berdasarkan pengertian tersebut, Robbins lebih memfokuskan pada 3 (tiga) hal utama yaitu : (1). **Gagasan baru** yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan

baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, Ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal; (2). **Produk dan jasa** yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan dimplementasikan termasuk hasil inovasi dibidang pendidikan dan (3). **Upaya perbaikan** yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (*improvement*) yang terus menerus sehingga buah **inovasi** itu dapat dirasakan manfaatnya.

Inovasi mempunyai 4 (empat) ciri yaitu :

1. Memiliki kekhasan / khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar Orsinalitas dan kebaruan.
3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun keg-inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.
4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Sifat Perubahan Dalam Inovasi Ada 6 (enam) Kelompok Yaitu: (1). Penggantian (*substitution*), misalnya : Inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan, alat-alat atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru; (2).Perubahan (*alternation*), Misalnya : Mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, ditambah dengan tugas menjadi guru pembimbing dan penyuluhan / mengubah kurikulum sekolah yang semula bercorak teoretis akademis menjadi kurikulum dan mata

pelajaran yang berorientasi bernuansa keterampilan hidup praktis; (3).Penambahan (*addition*), misalnya : Adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan guru sekolah dasar dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada; (4). Penyusunan kembali (*restructturing*), misalnya : Upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, menyusun kembali urutan mata-mata pelajaran / keseluruhan sistem pengajaran, sistem kepengkatan, sistem pembinaan karier baik untuk tenaga edukatif maupun tenaga administratif, teknisi, dalam upaya perkembangan keseluruhan sumber daya manusia dalam sistem pendidikan; (5). Penghapusan (*elimination*), contohnya : Upaya menghapus mata-mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran menulis halus, atau menghapus kebiasaan untuk senantiasa berpakaian seragam dan (6). Penguatan (*reinforcement*), misalnya : Upaya peningkatan atau pementapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam permudahan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah yang mendorong inovasi akan memperoleh hasil yang positif berupa keuntungan di sektor publik, seperti: *pertama*, mendorong optimalisasi pemanfaatan dan kapasitas sumberdaya untuk pengembangan nilai publik dalam mengatur partisipasi sehingga mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*); *Kedua*, untuk kepentingan pembangunan citra dan peningkatan pelayanan publik, inovasi daerah dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam menggapai kepercayaan penguatan legitimasi sosial; *Ketiga*, inovasi publik dapat meningkatkan rasa percaya diri yang kuat dari aparatur dan menjadi mendorong bangkitnya kesadaran dalam pengembangan diri; *Keempat*, kendati inovasi daerah kurang mendapat intervensi Pemerintah, namun hal tersebut dapat menimbulkan efek domino berupa keberhasilan di sektor yang satu akan membuka peluang pengembangan di sektor lainnya; dan *kelima*, inovasi akan menghasilkan peluang bagi inovasi berkelanjutan (Sihombing, 2016).

Peneliti inovasi dari Jerman Jurgen Hausschildt dan Klaus Brockhoff (1997) telah menggambarkan proses terciptanya sebuah inovasi. Kedua peneliti tersebut secara khusus membedakan antara kemunculan sebuah gagasan berupa invensi dan pengembangan produk yang siap “jual”. Pada tahapan tersebut, dijelaskan inovasi merupakan konsep yang lebih luas dari invensi dan pengembangan produk. Setiap tahapan berisikan proses pengambilan

keputusan yang didasarkan penerimaan umum atau penolakan terhadap gagasan, kelayakan teknologis dan keberhasilan dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kedua peneliti juga membedakan antara invensi yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, dengan menegaskan bahwa pada hakekatnya inovasi sebagai hasil dari perencanaan yang sukses atau pemanfaatan peluang.

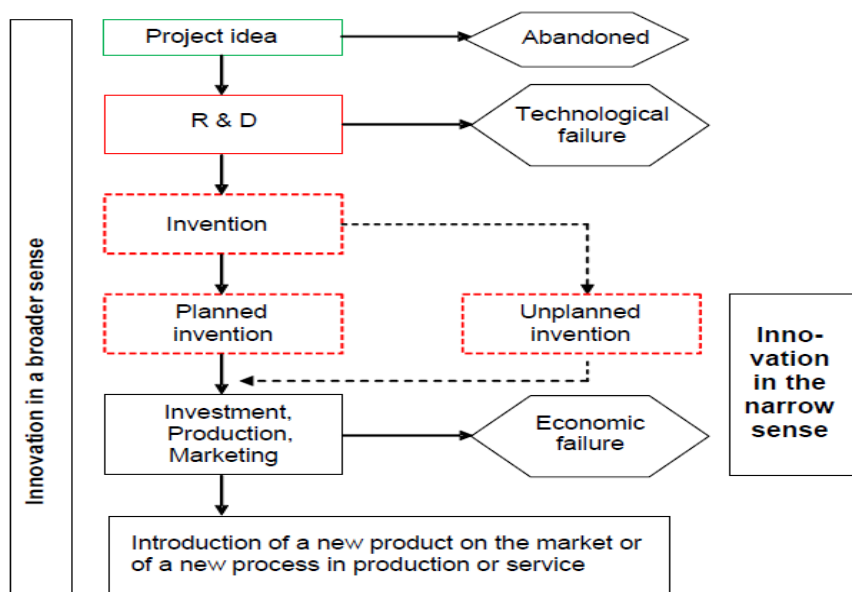


Figure 1: Correlation between invention and innovation (see Brockhoff 1997: 36; Strebe 2003: 21)

Gambar 2. Hubungan Antara Invensi dan Inovasi

Untuk menentukan tingkat inovasi yang dimaksud maka perlu diketahui sumber dari masing-masing inovasi. Menurut Hutauruk (2011), inovasi dilihat dari sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu :

#### a. Inovasi Adoptif

Inovasi adoptif adalah inovasi yang bersumber pada program-program yang sebelumnya telah ada, dan dinilai cukup berhasil oleh pemerintah daerah. Untuk selanjutnya ditiru seutuhnya atau diambil sebagian dari program tersebut dengan nama program yang sama atau nama baru. Yang membedakan hanya sumber dan alokasi pembiayaan, serta penanggung jawab kegiatan. Contoh program yang dimaksud, antara lain: program konservasi kawasan mangrove, pembinaan masyarakat pesisir, pembangunan

pembangkit listrik Micro-Hidro, bantuan dana bergulir.

Program-program yang bersifat inovasi adoptif memiliki kelebihan dan kekurangan/kelemahan, antara lain: mudah untuk diikuti oleh masyarakat (tidak perlu sosialisasi), karena yang menjadi kelompok sasaran biasanya telah mengenal dengan baik program-program yang ditawarkan karena telah ada sebelumnya. Bagi program-program sebelumnya yang dianggap berhasil akan diikuti oleh masyarakat secara partisipasi. Namun, sebaliknya bila belum menunjukkan keberhasilan akan sukar mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi di dalamnya. Terlebih bila kinerja pemerintah setempat dinilai rendah oleh masyarakat. Sehingga akan menjadi hal yang sia-sia saja. Bahkan ada kesan pemerintah melaksanakan

program hanya untuk menghabiskan anggaran, bukan untuk kesejahteraan rakyat.

#### **b. Inovasi Instruktif**

Inovasi instruktif adalah inovasi yang dilakukan pemerintah daerah yang bersumber pada Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan sebagainya, yang pada prinsipnya berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Program-program tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan pada Juknis atau Juklak baku yang dibuat Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan di daerah-daerah.

Klaim-klaim atas keberhasilan yang diraih dari program yang bersifat instruktif tidak salah untuk disampaikan kepada publik. Hanya saja kembali pada prinsip-prinsip yang terkandung pada Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu, demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jelas bahwa adanya pengakuan atas kekhasan dari setiap daerah diperlukan pola kerja yang berbeda pula. Karena, salah satu sumber kegagalan sebuah program pemerintah adalah program-program yang ditawarkan bersifat umum (yang kebanyakan mengadopsi di pulau Jawa). Contoh yang termasuk dalam inovatif ini adalah: program Wajib Belajar (WAJAR) melalui pendidikan gratis, jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA), Kelompok Usaha Bersama (KuBe), Forum Kota Sehat (Forkohat), bantuan rumah sehat, Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB), gerakan penanaman sejuta pohon dan sebagainya.

#### **c. Inovasi mandiri**

Inovasi mandiri adalah terobosan-terobosan inovatif pemerintah daerah yang dilakukan atas dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Inovasi yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Contohnya adalah: ketika masyarakat di kawasan-kawasan terpencil mengalami kesulitan untuk berobat yang disebabkan aksesibilitas dan sarana transportasi yang masih minim, maka pemerintah daerah berupaya melakukan terobosan dengan jalan mengirim petugas medis untuk masuk ke kawasan-kawasan tersebut. Demikian pula

halnya dalam mengatasi masih tingginya angka buta aksara mendorong pemerintah untuk mendirikan balai-balai belajar yang sifatnya darurat.

### **III. Benchmarking**

Pengembangan inovasi di berbagai daerah telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Inovasi yang telah dilakukan oleh daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) telah mendapat *reward* dari Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN) untuk lebih memacu daerah secara terus menerus melakukan inovasi. Berikut digambarkan tentang ragam inovasi yang dilakukan daerah :

- (1).Inovasi Terintegrasi Layanan Pertanahan (Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang); (2). KPK PELUK KEBO (Kader Peduli Luka dan Perawatan Luka Diabetis Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta); (3). Layanan WARAS (Wisata Arsip Untuk Anak Sekolah) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa timur; (4). SAKERA JEMPOL (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak) dari Dinas KB dan Kependudukan Kabupaten Pasuruan; (5). IJUS MELON (Ijin Usaha Mikro melalui *Online*) dari Dinas Koperasi dan UMK Kota Semarang; (6). Posyandu Ternak Bagi Petani Ternak (Kabupaten Tanggamus); (7). POKMASWAS bidang Lingkungan Hidup (Kabupaten Maros); (8). Inovasi produk telur asin aneka rasa (Kabupaten Brebes); dan (9).Inovasi desain batik sunda (Kota bandung).

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari ragam inovasi yang telah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia tersebut ? . Setidaknya dapat diketahui bahwa untuk dapat melakukan inovasi, beberapa elemen yang perlu dicermati adalah : (1). **Atribut Inovasi** yang melingkupi 2 (dua) hal, *pertama*, deskripsi keunikan serta orisinalitas dan *kedua*, keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati; (2). **Jenis inovasi** yang dikembangkan, mulai dari produk, metode kerja, proses, rekayasa teknologi ataupun modernisasi organisasi; (3). **Proliferasi Inovasi**. Bahwa inovasi yang telah dilakukan hendaknya mampu untuk dikembangkan sampai pada taraf

komersialisasi. Dengan demikian, dalam konteks proliferasi dimaksud harus memuat komponen ekstensifikasi, diferensiasi, diseminasi atau developmentasi; (4). **Level Inovasi** memuat dimensi kreatif sebagai level terendah, strategis, produktif serta berkelanjutan sebagai level tertinggi; dan (5). **Sumber Inovasi**. Mengetahui sumber inovasi ini penting kaitannya dengan keberlanjutannya. Bagi sumber inovasi berbasis litbang, akan lebih mudah untuk dikembangkan, mengingat basis inovasinya dilakukan melalui seperangkat pengetahuan yang didukung oleh metode ilmiah.

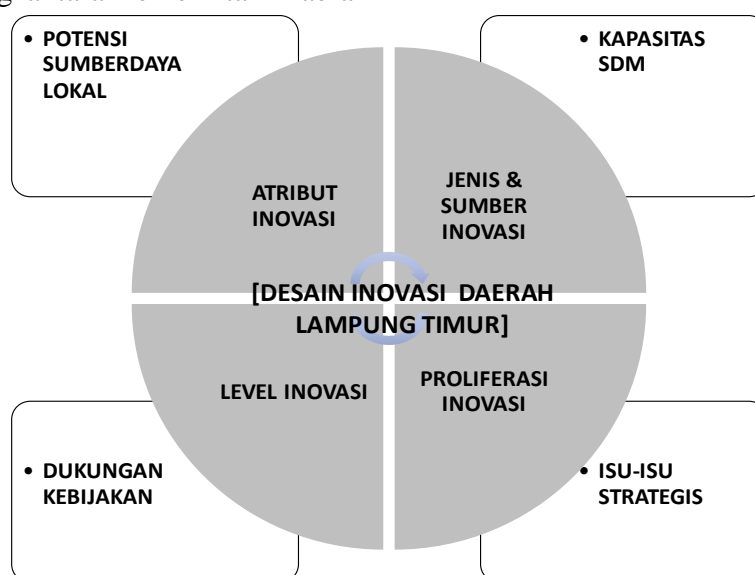
#### IV. Desain Pengembangan Inovasi

Sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya dan kekayaan yang melimpah, Kabupaten Lampung Timur berpotensi besar dalam mengembangkan inovasi daerahnya, baik dari sisi inovasi Pemerintah Daerah (inovasi pelayanan publik) maupun oleh pihak swasta dan masyarakat. Di era Kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim, gagasan-gagasan cerdas dalam berinovasi sudah dan akan terus dilakukan.

Beberapa program pembangunan yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, seperti : program *Nemui Nyimah* (inovasi dalam memangkas jalur komunikasi yang relatif panjang antara Pemerintah Daerah

dengan rakyatnya dan menyerap aspirasi secara langsung), *program Kabupaten Lampung Timur ramah HAM* (introduksi nilai-nilai HAM yang menjiwai kehidupan sosial masyarakat), *Gerakan Malu Menganggur* (inovasi dalam membangkitkan semangat kewirausahaan para pemuda/ generasi muda untuk bekerja keras). *Program Desa Ramah Anak* (inovasi dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak agar terhindar dari kekerasan) merupakan ragam inovasi publik dalam konteks produk (kebijakan) maupun penyempurnaan metode kerja. Namun demikian, gagasan tersebut baru pada tingkatan merespon dan menangkap isu-isu strategis yang memang menjadi fakta bahwa permasalahan yang berkembang tersebut membutuhkan solusi segera dan tepat sasaran.

Untuk menyusun desain pengembangan inovasi di Kabupaten Lampung Timur, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan 4 (empat) komponen yang menjadi acuan dasar pengembangan inovasi, meliputi : potensi sumberdaya lokal, kapasitas SDM, Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dan didasarkan atas kebutuhan dalam menyelesaikan isu-isu strategis. Keempat komponen tersebut menjadi masukan dalam pengembangan inovasi dengan mempertimbangkan atribut, jenis dan sumber inovasi, level inovasi dan proliferasi inovasi (Lihat Gambar 3).



Gambar 3. Desain Inovasi Daerah Lampung Timur



Lampung Timur memiliki potensi sumberdaya lokal yang melimpah, misalnya di sektor pertanian, daerah ini menjadi sentra tanaman seperti Ubi Kayu, kakao, jagung, nenas, lada dan sebagainya. Dari sisi potensi sumberdaya lokal tersebut, cukup banyak limbah yang dihasilkan dan tidak termanfaatkan dengan baik. Dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan (*green economy*) mensyaratkan adanya pemanfaatan limbah menjadi produk sampingan (*by product*) yang bernilai tambah. Dengan melihat potensi sumberdaya lokal tersebut, inovasi dapat ditumbuhkembangkan seperti : kulit dalam ubi kayu misalnya dapat diolah menjadi makanan, kulit jagung untuk produk kerajinan tangan, kulit kakao dapat diolah menjadi kerupuk dan sebagainya (*zero waste*).

Dari sisi SDM, Lampung Timur memiliki potensi SDM yang besar khususnya generasi muda yang dapat diarahkan untuk mengisi pembangunan daerah. Dalam diri generasi muda perlu dibangkitkan talenta dan daya kreativitasnya.

Dari perspektif isu-isu strategis, kegiatan menumbuhkembangkan inovasi (khususnya inovasi publik) dapat dikancah dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang mengemuka. Misalnya dalam kasus pengembangan sektor kepariwisataan, masih relatif lemahnya potensi kelembagaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam memainkan perannya sebagai aktor utama dalam memperkenalkan dan mempromosikan destinasi wisata di desanya. Pembentukan forum Pokdarwis misalnya dapat menjawab kebekuan interaksi sesama penggiat pariwisata untuk *sharing* pengalaman dan menyusun strategi pengembangan pariwisata bersama.

Dalam mendorong inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu seyogianya memberikan dukungan penuh terhadap berbagai inovasi yang dilakukan oleh masyarakat (pemuda, pelajar, mahasiswa,

TPID, Bumbes, Karang Taruna) dengan memberikan wadah seperti festival inovasi secara berkelanjutan dan periodik, memberikan *reward* bagi inovasi yang mendapatkan penghargaan nasional, sambil melakukan inventarisasi, menyusun direktori inovasi, dan mengevaluasi invensi dan kreativitas masyarakat agar lebih berkembang.

### Daftar Pustaka

- Hutauruk T.R (2010). *Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Timur*. Politeknik Negeri Samarinda.
- Bappenas (2018). *Kebijakan Nasional Pengembangan Penelitian dan Inovasi Daerah Dalam Mendukung Nawacita*. Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN / Bappenas.
- Tuerah N (2008). *Inovasi Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Makalah pada Seminar Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Salatiga
- Majalah Simpul Perencana Volume 3 September 2017. Pusbindilaren, Bappenas
- Sihimbing T (2016). *Public Seervice Innovation and Reform Toward Good local Governance*. Global Journal of political anf Law Reform. Vol. 4 No. 1 Februari 2016
- Schluz K,P (2008). *The Nature of Innovation And Implication On Innovation Management*. Conference On Regional Development and Innovation Process, Porvoo-Borga, Finland
- <http://definisiimu.blogspot.com/2012/08/definisi-inovasi.html>
- <http://digilib.unila.ac.id/15763/17/BAB%20II.pdf>